



BUPATI CIREBON

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.1090Bapenda/ 2023

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappedalitbangda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Seri D);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 30 Tahun 2022).

- Memperhatikan
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1Kep.49–Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
 2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.7.2.6/Kep.891 – Bapenda/2023 tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
 3. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22/1682/ Bappelitbangda tanggal 12 Mei 2023 tentang Tahapan dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas
- 3.3 Program Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

- KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Pendapatan Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
- KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 yaitu :
- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
 - b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
 - d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja tahun 2023.
- KEENAM : Sekretaris Badan, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome.
- KETUJUH : Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 000.7.2.6/Kep. 1090-Bapenda/2023

Tanggal : 14 November 2023

Tentang : Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pendapatan Daerah dan mengacu pada RKPD Kabupaten Cirebon.

Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah dan lembaga otonomi di daerah mempunyai peran yang sangat strategis, sebagai ujung tombak untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpunan dana baik untuk pelaksanaan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan di daerah.

Agar sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dapat digali secara optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan perencanaan yang baik.

Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja sebagai suatu proses penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) Tahun 2019-2024.

Pemerintahan Kabupaten Cirebon mempunyai perhatian yang sangat besar dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini tertuang dalam kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penggalan sumber-sumber pendapatan dan keuangan daerah, untuk melaksanakan otonomi daerah mencapai visi Kabupaten Cirebon yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman “

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perUndang-Undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10 Seri E.3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai panduan untuk pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 dengan memperhatikan dinamika yang terjadi selama tahun berjalan, dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran, serta mewujudkan efisiensi sumber daya dalam pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang gambaran umum tentang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan secara ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

**2. BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2023
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening	Nama Rekening	Tahun 2022 (sd. Tri Wulan II)		
		Target	Realisasi	%
4.1.01.06..	Pajak Hotel	7.970.486.706	4.746.333.140	59,55
4.1.01.07..	Pajak Restoran	22.212.100.000	13.995.331.454	63,01
4.1.01.08..	Pajak Hiburan	1.696.600.000	1.033.167.655	60,90
4.1.01.09..	Pajak Reklame	6.636.978.293	3.105.380.290	46,79
4.1.01.10..	Pajak Penerangan Jalan	96.728.000.000	46.303.498.958	47,87
4.1.01.11..	Pajak Parkir	644.053.246	441.252.156	68,51
4.1.01.12..	Pajak Air Tanah	3.931.987.671	1.901.295.067	48,35
4.1.01.13..	Pajak Sarang Burung Walet	68.796.000	19.460.000	28,29
4.1.01.14..	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17.585.546.378	5.097.416.600	28,99
4.1.01.15..	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	65.429.169.624	37.222.135.040	56,89
4.1.01.16..	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.215.479.182	38.903.094.446	38,82
JUMLAH		323.119.197.100	152.768.364.806	47,28

Pada Tahun 2023 Anggaran belanja sebesar Rp28.150.190.993,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan puluh Tiga Rupiah) dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp14.524.388.498,00 (Empat Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau 51,60%. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 1 (satu) urusan pemerintahan yaitu urusan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (urusan) pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp4.443.579.083,00 (Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.891.878.842,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) sisa sebesar Rp2.551.691.240,00 (Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Satu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) atau tercapai sebesar 42,58%.

Sementara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Keuangan pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp23.706.620.911,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp12.632.509.656,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sisa sebesar Rp11.074.111.255,00 (Sebelas Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Sebelas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau tercapai sebesar 53,29%.

Tabel 4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 s.d Trivulan II

Kabupaten Cirebon

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	K	Rp	II	K	Rp	III	K	Rp	IV	K	Rp		K	Rp				
1		2	3	5		6		7		8						9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
0.00.	NON BIDANG URUSAN																											
0.00.01.	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase jumlah layanan yang dilaksanakan sesuai SOP, (Satuan: prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100	101,087,943,057	100	20,709,770,021	100	23,706,620,911	80	6,874,553,877	85	12,632,509,656	0	0	0	0	0	85	12,632,509,656	100	39,199,980,449	100	38.78	BADAN PENDAPATAN DAERAH, SEKRETARIAT BAPENDA			
0.00.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: Dok)	2	91,011,000	2	0	2	38,006,800	0	12,783,400	0	18,353,200	0	0	0	0	0	0	0	18,353,200	0	72,254,150	0	79.39			
0.00.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, (Satuan: Dok - Non Kumulatif)	2	32,211,000		0	2	11,152,600	2	6,989,800	2	6,989,800	0	0	0	0	0	2	6,989,800	2	6,989,800	100	21.70	SEKRETARIAT BAPENDA			
0.00.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	1	8,500,000		0	1	3,397,200	0	-	1	3,397,200	0	0	0	0	0	1	3,397,200	1	3,397,200	100	39.97	SEKRETARIAT BAPENDA			

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Jlmgkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 %		Unit Kerja Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15		
0.00.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, (Satuan: Dok - Non Kumulatif)	1	8,300,000			0	1	4,573,200	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA		
0.00.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, (Satuan: Dok - Non Kumulatif)	1	8,500,000			0	1	4,686,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA		
0.00.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, (Satuan: Dok - Non Kumulatif)	1	8,500,000			0	1	3,973,200	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA		
0.00.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, (Satuan: Dok - Non Kumulatif)	2	10,000,000			0	2	5,217,000	2	5,217,000	2	5,217,000	0	0	0	0	0	2	5,217,000	2	5,217,000	100	52.17	SEKRETARIAT BAPENDA
0.00.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	4	15,000,000			0	4	5,007,600	1	576,600	1	2,749,200	0	0	0	0	0	1	2,749,200	1	2,749,200	25	18.33	SEKRETARIAT BAPENDA
0.00.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Pelaporan dan Gaji Pegawai, (Satuan: Prosen)	100	25,251,411,000	100		0	100	22,023,798,800	0	6,219,169,920	50	11,656,014,204	0	0	0	0	0	50	11,656,014,204	50	35,269,426,536	50	139,67	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Jangkauan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				III				IV				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13x100%												
0.00.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, (Satuan: pegawai - Non Kumulatif)	73	25.225.730.000		0	73	22.007.819.000	62	6.210.788.820	63	11.646.902.604	0	0	0	0	0	0	63	11.646.902.604	63	11.646.902.604		86.30	46.17	BADAN PENDAPATAN DAERAH							
0.00.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, (Situan: Laporan - Non Kumulatif)	12	4.800.000		0	12	2.443.200	1	165.900	5	845.400	0	0	0	0	0	0	5	845.400	5	845.400		41.67	17.61	SEKRETARIAT BAPENDA							
0.00.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, (Satuan: laporan - Non Kumulatif)	12	5.400.000		0	12	3.073.200	2	1.503.000	6	1.554.000	0	0	0	0	0	6	1.554.000	6	1.554.000		50	28.78	SEKRETARIAT BAPENDA								
0.00.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, (Satuan: laporan - Non Kumulatif)	1	8.500.000		0	1	6.712.200	1	6.712.200	1	6.712.200	0	0	0	0	0	1	6.712.200	1	6.712.200		100	78.97	SEKRETARIAT BAPENDA								
0.00.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD, (Satuan: laporan - Non Kumulatif)	1	6.981.000		0	1	3.751.200	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-		0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA							
0.00.01.2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah SKPD, (Satuan: Dok)	1	61.000.000	1	0	1	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-		0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA							
0.00.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, (Satuan: Dok - Non Kumulatif)	1	11.000.000		0	1	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-		0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA							

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023		Rincian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Thn 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I			II			III			IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8			9			10			11			12			13=6-12		14=13/5x100%		15	
0.00.01.2.03.03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	1	10,000,000		0	1	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA
0.00.01.2.03.04		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, (Satuan: Dok - Non Kumulatif)	1	10,000,000		0	1	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA
0.00.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, (Satuan: Dok - Non Kumulatif)	12	10,000,000		0	12	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA
0.00.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, (Satuan: Dok - Non Kumulatif)	1	10,000,000		0	1	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA
0.00.01.2.03.07		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, (Satuan: Dok - Non Kumulatif)	1	10,000,000		0	1	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA
0.00.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, (Satuan: unit)	5	150,000,000	5	0	5	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA
0.00.01.2.05.01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, (Satuan: unit - Non Kumulatif)	4	60,000,000		0	4	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA
0.00.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, (Satuan: buah - Non Kumulatif)	122	90,000,000		0	122	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA
0.00.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpeliharanya Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah, (Satuan: aplikasi)	6	1,672,750,000	6	0	6	670,653,015	0	348,300,495	3	456,973,336	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,711,607,981	50	102.32					

No	Sasaran	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target/Renstra Peringkat Daerah (PD) Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran (Renja PD Thn berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8			9			10			11			12			13=6+12			K		Rp
										K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10			11			12			13=6+12			14=13/5x100%			15		
0.00.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, (Satuan: paket - Non Kumulatif)	10	25,000,000	0	10	9,738,141	4	4,383,895	7	6,300,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6,300,595	7	6,300,595	70	25.20	SEKRETARIAT BAPENDA	
0.00.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, (Satuan: paket - Non Kumulatif)	4	700,000,000	0	4	213,701,640	4	210,600,000	4	210,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	210,600,000	4	210,600,000	100	30.09	SEKRETARIAT BAPENDA	
0.00.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, (Satuan: paket - Non Kumulatif)	3	60,000,000	0	3	29,180,013	1	11,468,070	2	20,398,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20,398,170	2	20,398,170	66.67	34	SEKRETARIAT BAPENDA	
0.00.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, (Satuan: paket - Non Kumulatif)	2	180,000,000	0	2	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA	
0.00.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, (Satuan: paket - Non Kumulatif)	2	125,000,000	0	2	43,788,279	1	12,526,021	1	23,121,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23,121,521	1	23,121,521	50	18.50	SEKRETARIAT BAPENDA	
0.00.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan, (Satuan: dok - Non Kumulatif)	1	72,000,000	0	1	52,098,000	1	13,815,000	1	27,086,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27,086,500	1	27,086,500	100	37.62	SEKRETARIAT BAPENDA	
0.00.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, (Satuan: paket - Non Kumulatif)	4	230,000,000	0	4	229,979,822	1	74,933,753	2	132,952,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	132,952,604	2	132,952,604	50	57.81	SEKRETARIAT BAPENDA	
0.00.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: laporan - Non Kumulatif)	12	40,000,000	0	12	36,995,000	3	9,225,000	6	18,395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18,395,000	6	18,395,000	50	45.99	SEKRETARIAT BAPENDA	
0.00.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	12	120,000,000	0	12	42,036,000	3	11,348,756	6	18,118,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18,118,946	6	18,118,946	50	15.10	SEKRETARIAT BAPENDA	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Peringkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra PD Thn 2023 s.d Thn 2023		Unit Kerja Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I			II			III			IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8			9			10			11			12			13=6+12		14=13/5x100%		15					
0.00.01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, (Satuan: dok - Non Kumulatif)	12	30,000,000		0	12	13,136,120	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA	
0.00.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, (Satuan: Dok - Non Kumulatif)	6	90,750,000		0	6	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA		
0.00.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, (Satuan: Prosen)	100	1,680,000,000	100	0	100	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	84,609,690	5.04	
0.00.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan, (Satuan: Unit - Non Kumulatif)	8	250,000,000		0	8	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA	
0.00.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan, (Satuan: unit - Non Kumulatif)	10	80,000,000		0	10	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA	
0.00.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, (Satuan: unit - Non Kumulatif)	5	100,000,000		0	5	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA	
0.00.01.2.07.08		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan, (Satuan: unit - Kumulatif)	1	100,000,000		0	1	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA	
0.00.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan, (Satuan: unit - Non Kumulatif)	1	400,000,000		0	1	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA	
0.00.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang kebutuhan kantor, (Satuan: Prosen)	100	416,470,000	100	0	100	220,749,696	0	54,351,990	50	107,785,194	0	0	0	0	107,785,194	50	107,785,194	50	107,785,194	50	379,564,372	50	91.14								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Peringkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Tln Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tln berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tln 2023 (Akhir Tln Pelaksanaan Renja PD Tln 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tln 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				III				IV					K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15						
0.00.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, (Situan: laporan - Kumulatif)	12	30.000.000			0	12	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA						
0.00.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, (Situan: laporan - Kumulatif)	12	338.316.000			0	12	220.749.696	3	54.351.990	6	107.785.194	0	0	0	0	107.785.194	6	107.785.194	50	31.86	SEKRETARIAT BAPENDA						
0.00.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan, (Situan: Laporan - Kumulatif)	12	18.154.000			0	12	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA						
0.00.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, (Situan: Laporan - Kumulatif)	12	30.000.000			0	12	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA						
0.00.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sesuai standar pelayanan Prima, (Satuan: Prosen)	100	1.261.849.000	100		0	100	753.412.600	0	239.948.072	0	393.383.722	0	0	0	0	393.383.722	0	1.682.517.720	0	133.34							
0.00.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, (Satuan: Unit - Kumulatif)	60	255.000.000			0	32	147.152.500	10	42.732.302	23	71.892.902	0	0	0	0	71.892.902	23	71.892.902	38.3	28.19	SEKRETARIAT BAPENDA						
0.00.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, (Satuan: Unit - Kumulatif)	62	22.122.000			0	31	114.926.000	10	17.461.900	23	49.148.700	0	0	0	0	49.148.700	23	49.148.700	37.1	222.17	SEKRETARIAT BAPENDA						

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				III				IV					K	Rp	K	Rp	14=13/5x100%
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15							
0.00.01.2.09.08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara, (Satuan: unit - Non Kumulatif)	1	30.000.000			0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	SEKRETARIAT BAPENDA							
0.00.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, (Satuan: Unit - Non Kumulatif)	4	734.727.000			0	4	487.117.600	3	178.535.370	3	269.892.120	0	0	0	0	3	269.892.120	3	269.892.120	75	36.73	SEKRETARIAT BAPENDA						
0.00.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, (Satuan: unit - Non Kumulatif)	95	220.000.000			0	95	4.216.500	10	1.218.500	37	2.450.000	0	0	0	0	37	2.450.000	37	2.450.000	38.95	1.11	SEKRETARIAT BAPENDA						
5.02.	KEUANGAN																														
5.02.04.		PROGRAM PENGLOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatkan penerimaan pajak daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	14.66	36.217.436.182	16.23	4.334.053.720	14.66	4.443.570.082	1.90	929.911.985	3.80	1.891.878.842	0	0	0	0	3.80	1.891.878.842	16.23	8.327.991.362	110.71	22.99	BIDANG PENGLOLAAN PAJAK DAERAH; BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI							
5.02.04.2.01.		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah, (Satuan: Prosen)	100	10.537.437.530	100	-	100	4.443.570.082	0	929.911.985	47.28	1.891.878.842	0	0	0	0	47.28	1.891.878.842	47.28	8.327.991.362	47.28	79.03								
5.02.04.2.01.01		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Daerah, (Satuan: Dokumen -Non Kumulatif)	1	540.800.000			-	1	72.275.200	0	19.474.110	0	32.820.770	0	0	0	0	0	52.820.770	0	32.820.770	0	6.07	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN						
5.02.04.2.01.02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	3	400.000.000			-	3	324.873.530	0	12.750.000	1	29.676.500	0	0	0	0	1	29.676.500	1	29.676.500	33.33	7.42	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN						

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12			14=13/5x100%
5.02.04.2.01.03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, (Situan: Laporan - Non Kumulatif)	1	721,150,000	-	3	193,849,682	1	62,172,100	2	111,634,600	0	0	0	0	2	111,634,600	2	111,634,600	200	15.48	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN
5.02.04.2.01.04		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, (Situan: unit - Non Kumulatif)	4	668,300,000	-	2	184,270,700	0	9,770,070	0	21,940,140	0	0	0	0	0	21,940,140	0	21,940,140	0	3.28	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN
5.02.04.2.01.05		Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah, (Situan: Laporan - Non Kumulatif)	12	490,406,998	-	12	153,380,356	3	48,443,995	6	82,831,372	0	0	0	0	6	82,831,372	6	82,831,372	50	16.89	BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
5.02.04.2.01.06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, (Situan: Laporan - Non Kumulatif)	11	300,000,000	-	12	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
5.02.04.2.01.07		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya, (Situan: Dok - Non Kumulatif)	1	1,794,124,908	-	1	699,767,184	1	244,496,016	1	271,871,016	0	0	0	0	1	271,871,016	1	271,871,016	100	15.15	BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
5.02.04.2.01.08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah, (Situan: Dokumen - Non Kumulatif)	2	217,604,218	-	2	97,533,750	2	27,360,000	2	55,875,750	0	0	0	0	2	55,875,750	2	55,875,750	100	25.68	BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Tln Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tln berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tln 2023 (Akhir Tln Pelaksanaan Renja PD Tln 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tln 2023		Unit Kerja Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13x100%		15		
5.02.04.2.01.09		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah, (Satuan: Dokumen -Non Kumulatif)	12	180.000.000			12	24.147.000	3	4.345.234	6	11.745.234	0	0	0	0	6	11.745.234	6	11745234	50	6.53	BIDANG PENGLOLOA N PAJAK DAERAH		
5.02.04.2.01.10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	80000	2.744.761.406			0	800000	385000	347.421.320	610000	695.398.640	0	0	0	0	610000	695.398.640	610000	695.398.640	76.25	25.34	BIDANG PENGENDALIA N DAN EVALUASI PENDAPATAN		
5.02.04.2.01.11		Pemaignhan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengaighan, Pajak Daerah, (Satuan: Dokumen -Non Kumulatif)	12	260.000.000	0	18.545.610	6	86.736.000	3	18.545.610	6	37.091.220	0	0	0	0	6	37.091.220	6	37.091.220	50	14.27	BIDANG PENGENDALIA N DAN EVALUASI PENDAPATAN		
5.02.04.2.01.12		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, (Satuan: Dokumen -Non Kumulatif)	50	250.000.000				79.169.700	0	405.000	16	26.110.000	0	0	0	0	16	26.110.000	16	26.110.000	32	10.44	BIDANG PENGENDALIA N DAN EVALUASI PENDAPATAN		
5.02.04.2.01.13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	1	1.778.290.000	0	128.728.530	1	790.542.180	0	128.728.530	1	492.688.000	0	0	0	0	1	492.688.000	1	492.688.000	100	27.71	BIDANG PENGENDALIA N DAN EVALUASI PENDAPATAN		
5.02.04.2.01.14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan, Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, (Satuan: Laporan - Non Kumulatif)	4	192.000.000	0	6.000.000	1	79.134.400	0	6.000.000	1	22.195.600	0	0	0	0	1	22.195.600	1	22.195.600	25	11.56	BIDANG PENGENDALIA N DAN EVALUASI PENDAPATAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)										20.81	27.72	34.87	51.6	0	68.71	0	68.71	-	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang					
Predikat kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya* :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya* :																										

Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.	BELANJA DAERAH	28.150.190.993,00	14.524.388.498,00	51,6	25.043.823.741,00
5.1.	BELANJA OPERASI	27.936.489.353,00	14.313.788.498,00	51,24	24.452.510.051,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	20.695.512.130,00	10.822.656.550,00	52,29	17.611.826.245,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.461.873.700,00	2.409.053.826,00	53,99	4.259.459.474,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.177.035.600,00	1.762.782.956,00	55,49	3.156.932.708,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	327.283.200,00	184.727.912,00	56,44	323.469.922,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	198.450.000,00	104.760.000,00	52,79	198.450.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	94.414.000,00	36.720.000,00	38,89	55.160.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	105.700.000,00	58.615.000,00	55,45	105.070.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	211.652.300,00	111.526.800,00	52,69	196.403.040,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	76.863.800,00	32.576.558,00	42,38	66.371.362,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	46.500,00	25.969,00	55,85	42.709,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	239.784.600,00	104.591.699,00	43,62	131.605.874,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.660.900,00	3.181.718,00	41,53	6.488.432,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	22.982.800,00	9.545.214,00	41,53	19.465.427,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.971.600.000,00	1.023.212.747,00	51,9	2.101.083.750,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.628.680.000,00	884.612.747,00	54,31	1.787.340.000,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	267.200.000,00	138.600.000,00	51,87	238.140.000,00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	75.720.000,00	0	0	75.603.750,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14.262.038.430,00	7.390.389.977,00	51,82	10.809.587.870,00
5.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	14.262.038.430,00	7.390.389.977,00	51,82	10.807.992.870,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	0	0	0	1.595.000,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0	0	0	441.695.151,00
5.1.01.05.10.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0	0	0	441.695.151,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.240.977.223,00	3.491.131.948,00	48,21	6.840.683.806,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.509.757.657,00	875.980.502,00	58,02	1.595.515.643,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.509.757.657,00	875.980.502,00	58,02	1.595.515.643,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.268.137.666,00	1.516.792.948,00	46,41	2.993.835.613,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.242.642.196,00	602.864.794,00	48,51	1.255.576.246,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47.497.200,00	19.082.100,00	40,18	38.277.690,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.400.000,00	0	0	47.932.500,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	82.050.000,00	70.600.000,00	86,05	74.550.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	580.241.400,00	0	0	628.785.450,00

5.1.02.02.13.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.312.306.870,00	824.246.064,00	62,81	948.713.727,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	153.369.000,00	115.655.702,00	75,41	362.051.888,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	28.476.002,00	81,36	148.201.388,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	118.369.000,00	87.179.700,00	73,65	213.850.500,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	651.609.900,00	297.046.996,00	45,59	936.442.862,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	651.609.900,00	297.046.996,00	45,59	936.442.862,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.658.203.000,00	685.656.800,00	41,35	952.837.800,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.658.203.000,00	685.656.800,00	41,35	952.837.800,00
5.2.	BELANJA MODAL	213.701.640,00	210.600.000,00	98,55	591.313.690,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.701.640,00	210.600.000,00	98,55	591.313.690,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	0	0	0	63.450.000,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	63.450.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	28.353.840,00	27.000.000,00	95,23	96.175.120,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	28.353.840,00	27.000.000,00	95,23	23.360.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0	0	68.925.120,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0	0	3.900.000,00
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0	0	4.214.870,00
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	0	0	0	4.214.870,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	185.347.800,00	183.600.000,00	99,06	427.473.700,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	185.347.800,00	183.600.000,00	99,06	360.652.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0	0	66.821.700,00
	SURPLUS/DEFISIT	294.969.006.107,00	138.243.976.308,00		283.398.586.097,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Pengukuran kinerja merupakan proses untuk menilai keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi dari Badan Pendapatan Daerah. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target indikator sasaran dengan realisasi indikator sasaran. Pencapaian sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu **Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Persentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 17,25% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya (2021) sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dari hasil survei kuesioner kepada wajib pajak daerah sebelas jenis pajak target IKM 2021 diperoleh nilai sebesar 82,69 poin.

Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan berdasarkan indikator sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada Tahun anggaran 2022.

Tabel 6
Rumus / Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	IKK	TARGET	RUMUS / FORMULASI	JENIS DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	14,66%	Kenaikan / Penurunan Pajak Daerah dibagi Pajak Daerah tahun lalu dikali 100 % $\frac{308.442.409.838 - 263.053.751.571}{263.053.751.571} \times 100 = 17,25$	- Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022, sebesar Rp. 308.442.409.838,- - Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021, sebesar Rp. 263.053.751.571,-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,64 Poin	Dilakukan survei IKM melalui kuesioner yang disebar berjumlah 2027 kuesioner kepada wajib pajak daerah diperoleh nilai 82,69 Poin dengan Predikat B (Baik)	Laporan IKM Tahun 2022

Tabel 7
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon 2022

NO	INDIKATOR	IKK /IKU	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%	11,23	14,84	14,66	14,66	14,66	4,70	17,64	17,25	-	-
2	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82,28	82,46	82,64	82,82	83,00	82,30	82,48	82,69	-	-

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029, Kabupaten Cirebon ditetapkan ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Ciayumajakuning diarahkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor industri, bisnis kelautan dan pertanian dan kegiatan pertambangan mineral.

Rumusan arah dan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Cirebon bidang pajak daerah untuk lima Tahun ke depan, yaitu meningkatkan penerimaan pajak daerah tiap Tahun rata-rata 14,66% serta meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan indeks kepuasan masyarakat 83 poin.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023, yaitu:

- Terbitnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Adanya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan berinvestasi berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

Dalam era otonom daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensi harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

- a. Tunggakan pembayaran pajak daerah yang masih belum terselesaikan.
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review terhadap rancangan perubahan RKPD dilakukan untuk membandingkan antara rancangan RKPD murni dengan rancangan Perubahan RKPD sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari hasil pencermatan internal ada perbedaan antara jumlah anggaran yang diusulkan pada rancangan Perubahan RKPD dengan RKPD dengan jumlah anggaran murni Tahun 2023. Tetapi masih dimungkinkan ada pergeseran anggaran antar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon akan menambah usulan program dan kegiatan serta anggaran berdasarkan kebijakan daerah dan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan.

3. BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Kebijakan Nasional

- 1. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang

kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dilaksanakan dengan strategi memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Salah satu arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Keuangan adalah meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, dilaksanakan dengan strategi:

- a. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat) melalui peningkatan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/ daerah istimewa untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
 - b. Pengembangan kerja sama antar daerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru.
 - c. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui: 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah; 2) Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah, dan peraturan perUndang-Undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemik corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pandemi Covid-19 yang berimplikasi antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan Negara, dan peningkatan belanja Negara dan pembiayaan.

Instruksi presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang berimplikasi juga pada penurunan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

b. Kebijakan Provinsi

Salah satu Sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel. Sasaran ini akan diwujudkan dengan melaksanakan strategi meningkatkan reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam dua arah kebijakan yaitu :

1. Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintahan berbasis e-government
2. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis TIK

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah dan;
2. Meningkatnya kinerja badan dalam pelayanan masyarakat wajib pajak.

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah;
2. Meningkatnya penyelesaian piutang pajak daerah;
3. Meningkatnya percepatan proses pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, maka ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 ada 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Program pengelolaan pendapatan daerah.

Dari program-program tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah , sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Kegiatan :

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Kegiatan :

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam Subkegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.3.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.3.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 1.3.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - 1.3.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 1.3.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 1.3.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 1.3.6. Penyediaan Bahan/Material;
 - 1.3.7. Fasilitas kunjungan tamu.
 - 1.3.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

- 1.3.9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- 1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - 2.1.1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
 - 2.1.2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
 - 2.1.3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
 - 2.1.4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
 - 2.1.5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
 - 2.1.6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 2.1.7. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
 - 2.1.8. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
 - 2.1.9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
 - 2.1.10. Penagihan Pajak Daerah;
 - 2.1.11. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
 - 2.1.12. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
 - 2.1.13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggung jawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Cirebon ***“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”***.

Agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON



Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2023

Rencana Tahun 2023											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11	
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.02.	KEUANGAN										
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase jumlah layanan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 prosen	100 prosen	28.050.278.392	30.469.116.313	2.418.837.921			
5.02.01.2.01.				2 Dok	2 Dok	28.050.278.392	30.469.116.313	2.418.837.921			
5.02.01.2.01.0				2 Dok	2 Dok	23.558.467.711	24.549.230.895	990.763.184			
5.02.01.2.01.0				2 Dok	2 Dok	38.006.800	38.006.800	-			
5.02.01.2.01.0				2 Dok	2 Dok	11.152.600	11.152.600	-	PIS	PIS	
5.02.01.2.01.0				1 Dokumen	1 Dokumen	3.397.200	3.397.200	-	PIS	PIS	
5.02.01.2.01.0	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4.573.200	4.573.200	-	PIS	PIS	
5.02.01.2.01.0				1 Dok	1 Dok	4.686.000	4.686.000	-	PIS	PIS	
5.02.01.2.01.0				1 Dok	1 Dok	3.973.200	3.973.200	-	PIS	PIS	
5.02.01.2.01.0				2 Dok	2 Dok	5.217.000	5.217.000	-	PIS	PIS	
5.02.01.2.01.0				2 Dok	2 Dok	5.217.000	5.217.000	-	PIS	PIS	
5.02.01.2.01.0				2 Dok	2 Dok	5.217.000	5.217.000	-	PIS	PIS	

Rencana Tahun 2023										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	4 Laporan	5.007.600	5.007.600	-	PIS	PIS
5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Pelaporan dan Gaji Pegawai		100 Prosen	100 Prosen	22.162.798.800	22.162.798.800	-		
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		73 pegawai	73 pegawai	22.027.470.300	22.146.819.000	119.348.700	PIS	PIS
5.02.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Laporan	12 Laporan	2.443.200	2.443.200	-	PIS	PIS
5.02.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 laporan	12 laporan	3.073.200	3.073.200	-	PIS	PIS
5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	1 laporan	6.712.200	6.712.200	-	PIS	PIS
5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 laporan	1 laporan	3.751.200	3.751.200	-	PIS	PIS
5.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah SKPD		1 Dok	1 Dok	-	-	-		
5.02.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dok	1 Dok	-	-	-		
5.02.01.2.03.03.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
5.02.01.2.03.04.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Dok	1 Dok	-	-	-		
5.02.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Dok	12 Dok	-	-	-		

Rencana Tahun 2023											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Setelah Perubahan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Bertambah / Berkurang	Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)		10	11
5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Dok	1 Dok	-	-	-			
5.02.01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dok	1 Dok	-	-	-			
5.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		5 unit	5 unit	-	-	-			
5.02.01.2.05.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		4 unit	4 unit	-	-	-			
5.02.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		122 buah	122 buah	-	-	-			
5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpeliharanya Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah		6 aplikasi	6 aplikasi	670.653.015	670.653.015	-			
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10 paket	10 paket	9.738.141	9.738.141	-		PIS	PIS
5.02.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 paket	4 paket	28.353.840	213.701.640	185.347.800		PIS	PIS
5.02.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 paket	3 paket	29.180.013	29.180.013	-		PIS	PIS
5.02.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 paket	2 paket	-	-	-			
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	2 paket	43.788.279	43.788.279	-		PIS	PIS
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 dok	1 dok	52.098.000	52.098.000	-		PIS	PIS
5.02.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		4 paket	4 paket	229.979.822	229.979.822	-		PIS	PIS
5.02.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	12 laporan	36.995.000	36.995.000	-		PIS	PIS
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	59.567.000	42.036.000	(17.531.000)		PIS	PIS

Rencana Tahun 2023										
Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
5.02.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 dok	12 dok	13.136.120	13.136.120	-	PIS	PIS
5.02.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		6 Dok	6 Dok	-	-	-		
5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD		100 Prosen	100 Prosen	-	-	-		
5.02.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		8 Unit	8 Unit	-	-	-		
5.02.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 unit	10 unit	-	-	-		
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 unit	5 unit	-	-	-		
5.02.01.2.07.08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		1 unit	1 unit	-	-	-		
5.02.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	1 unit	-	-	-		
5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang kebutuhan kantor		100 Prosen	100 Prosen	312.658.880	312.658.880	-		
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	12 laporan	-	-	-		
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	220.749.696	312.658.880	91.909.184	PIS	PIS
5.02.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	-	-	-		
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	-	-	-		
5.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sesuai standar pelayanan Prima		100 Prosen	100 Prosen	1.365.113.400	1.365.113.400	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Target Capaian Kinerja		Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
				5	6							7
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11		
5.02.01.2.09.01.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		32 Unit	32 Unit	147.152.500	147.152.500	-	PIS	PIS		
5.02.01.2.09.02.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		31 Unit	31 Unit	114.931.800	114.926.000	(5.800)	PIS	PIS		
5.02.01.2.09.08.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		1 unit	1 unit	-	-	-				
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang, Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	4 Unit	487.117.600	933.818.600	446.701.000	PIS	PIS		
5.02.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang, Dipelihara/Direhabilitasi		95 unit	95 unit	4.223.000	169.216.300	164.993.300	PIS	PIS		
5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatkan penerimaan pajak daerah		14,66 Prosen	14,66 Prosen	4.491.810.681	5.919.885.418	1.428.074.737				
5.02.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah		100 Prosen	100 Prosen	5.919.885.418	5.919.885.418	-				
5.02.04.2.01.01.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	72.275.403	72.275.200	(203)	PIS	PIS		
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	342.373.715	324.873.530	(17.500.185)	PIS	PIS		
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	3 Laporan	3 Laporan	193.849.807	193.849.682	(125)	PIS	PIS		
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	2 unit	2 unit	184.270.814	284.270.700	99.999.886	PIS	PIS		
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	12 Laporan	12 Laporan	153.380.356	153.380.356	-	PIS	PIS		

Rencana Tahun 2023											
Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11	
5.02.04.2.01.0 6.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	-	
5.02.04.2.01.0 7.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-	1 Dok	1 Dok	704.777.706	1.499.954.220	795.176.514	PIS	PIS	
5.02.04.2.01.0 8.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-	2 Dokumen	2 Dokumen	103.263.000	97.533.750	(5.729.250)	PIS	PIS	
5.02.04.2.01.0 9.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	12 Dokumen	12 Dokumen	24.147.000	24.147.000	-	PIS	PIS	
5.02.04.2.01.1 0.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-	800.000 Dokumen	800.000 Dokumen	1.677.890.400	2.181.582.200	503.691.800	PIS	PIS	
5.02.04.2.01.1 1.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan, Pajak Daerah	-	12 Dokumen	12 Dokumen	86.736.000	86.736.000	-	PIS	PIS	
5.02.04.2.01.1 2.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	50 Dokumen	50 Dokumen	79.169.700	79.169.700	-	PIS	PIS	
5.02.04.2.01.1 3.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	1 Dokumen	1 Dokumen	790.542.380	842.978.680	52.436.300	PIS	PIS	
5.02.04.2.01.1 4.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan, Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	4 Laporan	4 Laporan	79.134.400	79.134.400	-	PIS	PIS	
J U M L A H						28.050.278.392	30.469.116.313	2.418.837.921			



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
e-mail : bppdkabcirebon@gmail.com

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 25 September 2023
Nomor : 100.3.3.2/494 /Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Kerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Berkenaan hal tersebut, bersama ini kami ajukan draf/konsep Peraturan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 untuk ditandatangani.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Drs. H. RAHMAT SUTRISNO. M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.